

WALUYO

EDISI 4

AKUNTANSI **PAJAK**



**Penerbit
Salemba Empat**

Daftar Isi



■ Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	v
■ Sambutan Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Indonesia	vii
■ Kata Pengantar	ix
■ Kata Pengantar Penerbit	xi

Bagian I Pendahuluan

I

■ Bab 1—Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan	3
PENDAHULUAN	4
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA	5
KONVERGENSI IFRS	6
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK BESAR)	7
LAPORAN KEUANGAN BERDASAR PSAK	9
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)	10
LAPORAN KEUANGAN BERDASAR SAK ETAP	12
PAJAK PENGHASILAN	14
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	14
MATA UANG PENCATATAN DAN PELAPORAN DALAM SAK ETAP	15
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN	16

■ Bab 2—Kewajiban Pembukuan	19
-----------------------------	----

PENDAHULUAN	20
KEWAJIBAN PEMBUKUAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN	20
KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	22
PERAN AKUNTANSI DALAM PERPAJAKAN INDONESIA	23
PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN	24
MATA UANG PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DAN KONVERGENSI IFRS	27
PENGECUALIAN DAN SANKSI DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN	27
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH	27
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN SATUAN MATA UANG ASING	28

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM PEMBUKUAN DENGAN BAHASA DAN MATA UANG ASING	29
KEWAJIBAN PERPAJAKAN	30
KONVERSI SATUAN MATA UANG DOLAR	31
KERAHASIAAN PEMBUKUAN	32
PEMBUKUAN DENGAN KOMPUTER	32
Bab 3—Prinsip Dasar Akuntansi Pajak	33
PENDAHULUAN	34
Bidang dalam Ruang Lingkup Akuntansi	34
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI INDONESIA	35
TEORI AKUNTANSI	36
SEJARAH PERKEMBANGAN PERPAJAKAN INDONESIA	38
PRINSIP DASAR AKUNTANSI PAJAK	40
HUBUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL DENGAN AKUNTANSI PAJAK	43
HUBUNGAN ISTIMEWA DAN PENILAIAN KEWAJARAN DALAM TRANSAKSI	43
PENILAIAN KEWAJARAN DALAM TRANSAKSI	47
Bab 4—Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	51
PENDAHULUAN	52
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL	52
LAPORAN KEUANGAN FISKAL	52
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	54
ASUMSI DASAR AKUNTANSI	54
KONSEP DASAR ENTITAS	55
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	56
PENGIDENTIFIKASIAN DAN PENGUKURAN DATA	57
PEMROSESAN	57
LAPORAN KEUANGAN	57
ANALISIS DAN INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN	58
PERSAMAAN AKUNTANSI	58
PENGUNAAN AKUN	62
PENGELLOMPOKAN AKUN	64
JURNAL	64
AKUN (LEDGER)	65
KERTAS KERJA (WORKSHEETS) PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	65
Bagian 2 Neraca	69
Bab 5—Akuntansi Kas dan Bank	71
PENDAHULUAN	72
AKUNTANSI KAS/PENGENDALIAN KAS	72
PENGELOLAAN DAN SISTEM PENCATATAN KAS KECIL	73
Imprest Method	73
Fluctuation Method	74
REKONSILIASI BANK	75
AKUNTANSI PAJAK	78

Bab 6—Akuntansi Piutang	81
PENGERTIAN PIUTANG	82
PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN	82
AKUNTANSI ATAS PIUTANG	82
METODE PENGHAPUSAN PIUTANG	83
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	83
PEMBEBANAN BIAYA PIUTANG TIDAK TERTAGIH	85
PENGHAPUSAN PIUTANG	86
AKUNTANSI PAJAK	86
PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH USAHA BANK	89
Bab 7—Akuntansi Persediaan	91
PENGERTIAN PERSEDIAAN	92
PENGUKURAN PERSEDIAAN	93
PENGAKUAN SEBAGAI BEBAN	94
PENCATATAN PERSEDIAAN	94
PENETAPAN PERSEDIAAN DAN PELAPORAN DALAM LAPORAN KEUANGAN	95
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN	97
METODE PENILAIAN LAINNYA	101
Akuntansi Pajak	102
Bab 8—Akuntansi Aset Tetap Berwujud	107
PENDAHULUAN	108
PENGAKUAN ASET TETAP	108
PENGUKURAN BIAYA PEROLEHAN	110
PEROLEHAN ASET TETAP	111
Perolehan Aset Tetap secara Gabungan	111
Perolehan Aset Tetap secara Angsuran	112
Perolehan Aset Tetap secara Pertukaran	113
Perolehan Aset Tetap dengan Cara Membangun Sendiri	116
Perolehan secara Hibah, Bantuan, dan Sumbangan	117
ASSET TETAP YANG DIHIBAHKAN	118
PENYUSUTAN ASET TETAP	120
METODE PENYUSUTAN SESUAI KETENTUAN KOMERSIAL	122
SAAT PENYUSUTAN ASET TETAP SESUAI KETENTUAN KOMERSIAL	129
HARGA PEROLEHAN ATAU HARGA PENJUALAN DALAM HAL TERJADI JUAL BELI HARTA	129
HARGA PEROLEHAN ATAU HARGA PENJUALAN DALAM HAL TERJADI TUKAR-MENUKAR HARTA	130
Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta karena Hibah, Bantuan atau Sumbangan, dan Warisan	133
Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta Termasuk Setoran Tunai yang Diterima oleh Badan sebagai Pengganti Penyertaan Modal	134
HARGA PEROLEHAN ASET MEMBANGUN SENDIRI	134
METODE PENYUSUTAN SESUAI KETENTUAN PERPAJAKAN	134
Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan	135
PENYUSUTAN PADA AKHIR MASA MANFAAT	140
SAAT PENYUSUTAN ASET TETAP	140
PENARIKAN HARTA BUKAN BANGUNAN	141

PENGELOMPOKAN HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN ATAS USAHA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER	141
Jenis Harta yang Disusutkan dan Pengelompokannya	142
Tata Cara Penghitungan Penyusutan Fiskal	142
PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS KOMPUTER, PRINTER, SCANNER, DAN SEJENISNYA	143
PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN	143
KETENTUAN LAIN	144
■ Bab 9—Kombinasi Bisnis	145
PENDAHULUAN	146
TUJUAN, LINGKUP, DAN IDENTIFIKASI BISNIS	146
METODE AKUISISI	148
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN ATAS KOMBINASI BISNIS	148
Penggunaan Harga Pasar	150
Penggunaan Nilai Buku	151
■ Bab 10—Revaluasi Aset Tetap	155
PENDAHULUAN	156
REVALUASI ASET BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 16 (REVISI 2007)	156
REVALUASI ASET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN	156
WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGAJUKAN REVALUASI ASET TETAP	158
ASET TETAP YANG DAPAT DINILAI KEMBALI	158
NILAI PASAR ATAU NILAI WAJAR	158
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SELISIH PENILAIAN KEMBALI	158
PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI	160
DASAR PENYUSUTAN ASET TETAP	160
BATAS WAKTU PEMBAYARAN	161
WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGALIHAN	161
PENYESUAIAN ATURAN DALAM PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP	162
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN	163
ASET YANG DIAJUKAN PERMOHONAN	163
AKUNTANSI PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP	163
TARIF PAJAK PENGHASILAN ATAS PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP	164
DASAR PENYUSUTAN DALAM HAL DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP	164
PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN	165
■ Bab 11—Akuntansi Aset Tidak Berwujud	167
PENDAHULUAN	168
PENGROLONGAN ASET TIDAK BERWUJUD DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA	168
TERMASUK PENGERTIAN ASET TIDAK BERWUJUD	170
Hak Paten	170
Hak Cipta	170
Merek Dagang	170
Waralaba	171
Leasehold	171
Goodwill	171
Biaya yang Ditangguhkan	173

DEPLESI	173
AMORTISASI	174
AMORTISASI DALAM AKUNTANSI PAJAK	176
PERIODE DAN METODE AMORTASI	176
Pengelompokan Aset Tidak Berwujud dan Tarif Amortisasi	177
SAAT AMORTISASI DAN AMORTISASI PADA AKHIR MASA MANFAAT	178
Ketentuan Khusus	178
PENGALIHAN HAK ASET TIDAK BERWUJUD	179
IDENTIFIKASI KEGIATAN RISET DAN PENGEMBANGAN	180
PENGUKURAN	182
SAAT AMORTISASI	183
AKUNTANSI PAJAK BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	184
Bab 12—Liabilitas	185
PENDAHULUAN	186
KLASIFIKASI LIABILITAS	186
UTANG DAGANG AKUNTANSI KOMERSIAL	187
UTANG DAGANG DENGAN JAMINAN (WARRANTY LIABILITY)	188
WESEL BAYAR	189
UTANG DIVIDEN	190
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	190
UTANG PAJAK	191
UTANG LAINNYA	191
UTANG DALAM MATA UANG ASING	191
UTANG BUNGA PINJAMAN	191
Bab 13—Akuntansi Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang	193
PENDAHULUAN	194
INVESTASI SAHAM	195
Investasi Bentuk Obligasi	197
AKUNTANSI PAJAK	198
Bab 14—Ekuitas	201
PENDAHULUAN	202
BENTUK HUKUM DAN EKUITAS	202
EKUITAS SAHAM	203
Bab 15—Akuntansi Mata Uang Asing	207
PENDAHULUAN	208
PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN	208
AKUNTANSI KERUGIAN SELISIH KURS MATA UANG ASING	210

Bagian 3 Daftar Perhitungan Laba Rugi**215**

Bab 16—Akuntansi Pajak Penghasilan	217
PENDAHULUAN	218
PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN	218
Penghasilan Tertentu (Perlakuan Tersendiri dalam Pengenaan Pajak)	224
Bukan Objek Pajak Penghasilan	225
Penghasilan Tidak Kena Pajak	229
TARIF PAJAK	230
Besarnya Tarif Pajak Penghasilan	230
ATURAN KHUSUS PENERAPAN TARIF WAJIB PAJAK BADAN	232
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK	232
PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG	233
PENGGABUNGAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI	234
PEMISAHAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI	235
Penghasilan Anak yang Belum Dewasa	236
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	236
Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	237
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	240
SAAT TERUTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	242
TARIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK BER-NPWP	243
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	243
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	244
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	244
TARIF PEMOTONGAN BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK BER-NPWP	245
PENGECUALIAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	245
PEMOTONG DAN SAAT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	245
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	246
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	246
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI	247
PENGKREDITAN DAN PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN	247
TATA CARA PENGKREDITAN	249
PENGGABUNGAN PENGHASILAN	249
Saat Penggabungan Penghasilan	249
Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri	249
PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI WAJIB PAJAK BADAN	251
PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	252
KERUGIAN DI DALAM NEGERI	252
PENGHASILAN WAJIB PAJAK DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL	253
PENGURANGAN/PENGEMBALIAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	254
PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN LUAR NEGERI	254
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	256
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	258
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	260
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	260
AKUNTANSI PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN YANG PENGENAANNYA BERSIFAT FINAL	261
Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berpenghasilan Rendah	262
Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan	262

BEBERAPA JENIS PENGHASILAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL	263
Hadiyah Undian	266
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	267
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi	267
Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan kepada Anggota Koperasi	268
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Derivatif	268
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN	269
PERBEDAAN TEMPORER	271
PERBEDAAN TETAP	271
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	271
PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN	272
PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN	277
Bab 17—Klasifikasi Biaya dan Kompensasi Kerugian	279
PENDAHULUAN	280
BIAYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN	280
BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN	284
KLASIFIKASI BIAYA SESUAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN	287
KOMPENSASI KERUGIAN	290
Akuntansi Perpajakan	291
Bab 18—Rekonsiliasi Laporan Keuangan	293
PENDAHULUAN	294
BENTUK REKONSILIASI	296
Bab 19—Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	301
PENDAHULUAN	302
OBJEK PAJAK	302
Objek Pajak Pertambahan Nilai	302
Barang Kena Pajak	304
Jasa Kena Pajak	304
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK	305
Tidak Termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak	307
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK	308
Jasa Kustodian	308
Jasa Consumer Credit, Credit Card, dan Debit Card	308
Jasa Penagihan Listrik dan Telepon oleh Bank	308
Jasa Angkutan dan Jasa Ekspedisi Muatan	308
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	309
Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah	309
TARIF PAJAK	309
Tarif Pajak Pertambahan Nilai	309
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah	310
DASAR PENGENAAN PAJAK	311
Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak	312
Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran	313
Nilai Penyerahan yang Menggunakan Valuta Asing	313

CARA MENGHITUNG PAJAK	313
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai	313
PPN atau PPnBM menjadi Bagian dari Harga	314
Penghitungan PPN dan PPnBM dalam Satu Transaksi	314
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	315
FAKTUR PAJAK	315
Kelompok Faktur Pajak	317
TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK	319
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PENGGANTI, SALINAN ARSIP FAKTUR PAJAK, DAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK	320
PERSYARATAN FORMAL DOKUMEN TERTENTU	321
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	321
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK	322
PENGEMBALIAN BARANG KENA PAJAK (RETUR)	322
PEMBATALAN JASA KENA PAJAK	323
LARANGAN DAN SANKSI DALAM PEMBUATAN FAKTUR PAJAK	323
PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN	324
Pengkreditan Pajak Masukan	324
Tempat Pengkreditan Pajak Masukan	325
Kelebihan Pajak Masukan	325
PAJAK MASUKAN DALAM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN TIDAK TERUTANG PAJAK	326
PENGUSAHA YANG MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN	327
PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	329
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA	330
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN	331
AKUNTANSI PAJAK	332

Bagian 4 Akuntansi Pajak Usaha Tertentu

337

■ Bab 20—Akuntansi Sewa	339
PENDAHULUAN	340
KLASIFIKASI SEWA	342
Dari Segi Lessor	343
Dari Segi Lessee	344
PELAKSANAAN TRANSAKSI SEWA	344
Keuntungan dan Kerugian Sewa	344
PRAKTIK AKUNTANSI SEWA	345
PENGHITUNGAN PEMBAYARAN SEWA	346
PENYERAHAN JASA DALAM KATEGORI SEWA	349
■ Bab 21—Akuntansi Kontrak Konstruksi	351
PENDAHULUAN	352
AKUNTANSI KONTRAK KONSTRUKSI	352
PENGGUNAAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN	354
PAJAK PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI	354
OBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI	358

TARIF PAJAK PENGHASILAN UNTUK USAHA JASA KONSTRUKSI	358
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN	358
LINGKUP PEKERJAAN LAINNYA DAN ATURAN PERALIHAN HUBUNGAN KEBESARAN TIDAK STANDAR	359
■ Bab 22—Akuntansi Murabahah (Transaksi Berbasis Syariah)	361
PENDAHULUAN	362
MEKANISME DALAM MURABAHAH	362
IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN AKUNTANSI TRANSAKSI MURABAHAH	363
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH	365
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI BERBASIS SYARIAH	366
TRANSAKSI MURABAHAH DAN ASPEK PERPAJAKANNYA	366
Babian 5 Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak	367
■ Bab 23—Pemeriksaan Pajak	369
PENDAHULUAN	370
PEMERIKSAAN PAJAK	370
BEBERAPA ISTILAH DALAM PEMERIKSAAN PAJAK	371
TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK	373
RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PEMERIKSAAN PAJAK	373
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN	374
STANDAR PEMERIKSAAN	375
KERTAS KERJA PEMERIKSA PAJAK	377
KEWAJIBAN PEMERIKSA PAJAK	377
Pemeriksaan Lapangan	377
Pemeriksaan Kantor	378
TAHAPAN PEMERIKSAAN	379
TEKNIK PEMERIKSAAN	379
Metode Pemeriksaan	380
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SELAMA PEMERIKSAAN	380
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	382
■ Bab 24—Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	385
PENDAHULUAN	386
PENGAMATAN	386
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN	387
Dasar Pemeriksaan Bukti Permulaan	389
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN	389
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN	390
PENYIDIKAN	390
Tindak Pidana	391
Tersangka	392
PELAKU TINDAK PIDANA	392
WEWENANG PENYIDIK PAJAK	393

■ Soal dan Pembahasan Akuntansi Pajak	S-1
■ Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak	S-25
SOAL UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK (USKP) AKUNTANSI PERPAJAKAN "A"	S-26
SOAL UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK (USKP) AKUNTANSI PERPAJAKAN "B"	S-30
SOAL UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK (USKP) AKUNTANSI PERPAJAKAN "C"	S-33
■ Daftar Pustaka	D-1
■ Indeks	I-1